

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan dengan Penelitian yang Dilakukan
1	Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi  Bhakti, dkk (2022)	Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi program MBKM di berbagai perguruan tinggi.	Metode yang digunakan yaitu penelitian non-riset. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui <i>library research</i> . Teknik pengumpulannya adalah dengan mengidentifikasi sumber rujukan sesuai tema penelitian yang dikaji.	Hasil penelitian menunjukkan kendala dalam pelaksanaan program MBKM di Perguruan Tinggi beraneka ragam. Tiap sub-program dari MBKM memiliki kendala masing-masing juga. Selain itu, tiap perguruan tinggi juga memiliki kendala dalam mengikuti program MBKM.	Persamaannya adalah pada sisi tujuan penelitiannya. Kalau lokasi penelitian dari penulis adalah di lingkup internal universitas, sedangkan penelitian kedua ini di berbagai perguruan tinggi. Lalu, perbedaannya adalah pada sisi fokus penelitiannya.

2	<p>Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Swasta: Survey Pendidikan Sejarah Universitas Flores</p> <p>Agustina, dkk (2022)</p>	<p>Mengetahui implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi swasta melalui survey pada program studi pendidikan Sejarah Universitas Flores</p>	<p>Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta metode survei.</p>	<p>Para mahasiswa memberikan respon yang positif terhadap program MBKM dan sudah menyiapkan diri dengan baik</p>	<p>Persamaannya terletak pada studi implementasi kebijakan. Sedangkan perbedaannya ialah pada metode penelitiannya. Kalau yang ini menggunakan kuantitatif melalui survei, sedangkan milik penulis ialah kualitatif melalui wawancara</p>
3	<p>Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar)</p> <p>Nur Asiah (2021)</p>	<p>Mengetahui yuridiktas kebijakan MBKM, pelaksanaan kebijakan MBKM, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MBKM di FISH Universitas Negeri Makassar</p>	<p>Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris Metode penelitiannya adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi</p>	<p>MBKM telah sejalan dengan dasar hukum dan tujuan untuk menyediakan pendidikan yang layak dan lebih baik, pelaksanaan kebijakannya berjalan dengan baik, kendala yang dialami oleh mahasiswa dan dosen cukup beragam</p>	<p>Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu tentang implementasi kebijakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Kalau milik penulis sendiri fokus pada proses implementasi nya, sedangkan penelitian ini tidak.</p>

Berikut kesimpulan dari ketiga penelitian terdahulu:

#### 2.1.1. Penelitian Pertama

Penelitian pertama ini dilaksanakan oleh Bhakti, dkk (2022) dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indraprasta PGRI, dan Universitas Kristen Jakarta dengan judul ‘Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi’<sup>6</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non-riset. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui *literature research*<sup>7</sup>.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan artikel dari jurnal tentang kendala implementasi sebagai sumber primernya. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari buku pedoman MBKM, peraturan menteri dan Undang-Undang sebagai sumber rujukan sekunder<sup>8</sup>.

Fakta menarik dari hasil temuan kendala implementasi yang dihadapi oleh perguruan tinggi dari penelitian tersebut adalah kesulitan dalam melakukan rekognisi (konversi) SKS oleh program studi. Selain itu, ada 15 kendala lainnya yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan MBKM<sup>9</sup>.

#### 2.1.2. Penelitian Kedua

Penelitian kedua ini dilaksanakan oleh Agustina, dkk (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan

---

<sup>6</sup> Budi Bhakti dkk, "Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi." *Research and Development Journal of Education* 8, no. 2 (October 2022): 783-790.

<sup>7</sup> Ibid Hal. 785

<sup>8</sup> Ibid Hal. 785

<sup>9</sup> Ibid Hal. 785

Tinggi Swasta: Survey Pendidikan Sejarah Universitas Flores”<sup>10</sup>. Metode penelitian yang diterapkan ialah kuantitatif dan teknik penelitian yang digunakan ialah metode survei.

Data diperoleh dari populasi yang berjumlah 147 responden yang merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores.<sup>11</sup> Data dikumpulkan melalui kuesioner survei SPADA DIKTI. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang positif. Maksudnya, mayoritas responden menyiapkan diri dalam mengikuti program MBKM. Selain itu, program yang paling diminati adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan karena mahasiswa semester 6 wajib mengikuti mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)<sup>12</sup>. Jadi, secara tidak langsung matkul tersebut terpenuhi dengan mengikuti program asistensi mengajar dari MBKM.

### 2.1.3. Penelitian Ketiga

Penelitian ketiga ini merupakan karya skripsi yang dilakukan oleh Nur Aisah (2022) dari Universitas Negeri Makassar dengan judul “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar”<sup>13</sup>. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk

---

<sup>10</sup> Agustina dkk, “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Swasta: Survey Pendidikan Sejarah Universitas Flores,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4, No. 2,

<sup>11</sup> Ibid Hal. 2067

<sup>12</sup> Ibid Hal. 2068

<sup>13</sup> Nur Aisha, “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitasnegeri Makassar,” *E-Prints Repository Universitas Negeri Makassar*, 1

mengetahui yuridiksitas kebijakan MBKM, bagaimana pelaksanaannya, dan kendala apa saja yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Ada satu hal menarik bagi penulis dari penelitian ini, yaitu kendala yang ditemukan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh responden ialah kekhawatiran perihal konversi SKS serta nilainya<sup>14</sup>. Hal ini menjadi faktor penting dari terhambatnya proses implementasi kebijakan ini.

## **2.2. Kajian Teori**

### **2.2.1. Kebijakan Publik**

Dalam KBBI, kebijakan bisa juga berarti tujuan prinsip, pernyataan cita-cita, atau garis haluan. Secara etimologi, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standard, proposal, dan *grand design*. Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk merujuk perilaku pada seorang aktor. Aktor yang dimaksud bisa seorang pejabat ataupun lembaga pemerintah<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Ibid Hal. 15

<sup>15</sup> Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 21

Pendapat selanjutnya diutarakan oleh Carl Friederich<sup>16</sup>. Ia memandang kebijakan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk menggunakan dan mengatasi segala hal dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran dan maksud tertentu.

Dalam memahami kebijakan publik ada dua jenis aliran atau spektrum, yaitu Kontinentalis dan Anglo-Saxonis<sup>17</sup>. Pemahaman Kontinentalis memandang bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga kita melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara. Sedangkan pemahaman Anglo-saxon memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik<sup>18</sup>.

Apabila dilihat dari sisi formulasi kebijakan, fase implementasi ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.

### **2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik**

Kata 'implementasi' berasal dari terjemahan "*implementation*" dari kata kerja yaitu "*to implement*". Kata *to implement* sendiri diambil dari Bahasa Latin

---

<sup>16</sup> Ibid Hal. 22

<sup>17</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media, 2004).

<sup>18</sup> Ibid Hal. 21

implementum yaitu kata *impre* dan *plere* (Webster's Dictionary, 1979). Selanjutnya kata *to implement* yang dimaksudkan disini adalah sebagai *to carry into effect, to fulfill, to accomplish; to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to; to provide or equip with implements* (Webster's Dictionary, 1979)<sup>19</sup>.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (1978) mengemukakan bahwa “*policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem*”. Kemudian Edwards III (1980) mengemukakan bahwa “*policy implementation, ... is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the consequences of the policy for the people whom it affects*”. Sedangkan Grindle (1980) mengemukakan bahwa “*implementation - a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*”<sup>20</sup>.

### **2.2.3. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Penulis akan menggunakan pendekatan implementasi *top-down* untuk melihat sejauh mana efektifitas proses implementasi kebijakan MBKM di UWKS. Sedangkan untuk kebutuhan fondasi literatur dalam menganalisis topik penelitian ini, penulis menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Meter & Horn (1975)<sup>21</sup>.

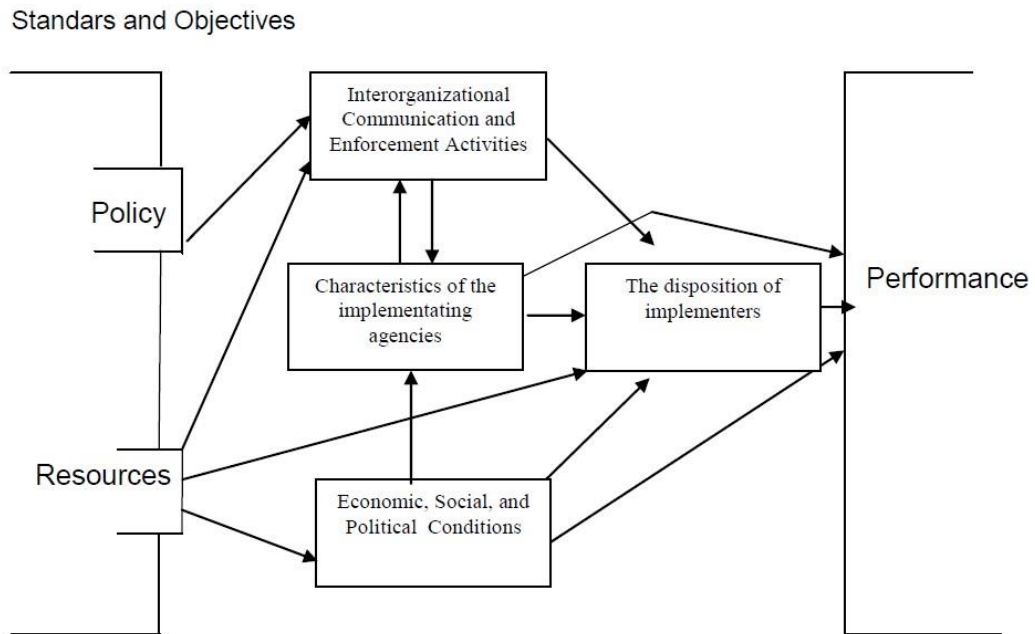
---

<sup>19</sup> Ibid Hal. 23

<sup>20</sup> Ibid Hal. 25

<sup>21</sup> Rulinawaty Kasmad. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kedai Aksara, 2013)

**Gambar 2.1** Model Implementasi Meter & Horn



Sumber: Meter & Horn, 1975:463 (dalam Studi Implementasi Kebijakan Publik)<sup>22</sup>

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel bebas yang saling berkaitan. 2 variabel pertama (di kotak sisi kiri) membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja dan kemudian ditambah lagi dengan 4 variabel (di kotak-kotak bagian tengah) yang berhubungan dengan kinerja kebijakan, Interaksi yang terjadi satu sama lain akan berdampak sejauh mana efektifitas implementasinya (di kotak sisi kanan). Berikut penjelasan lebih rinci terkait 6 variabel tersebut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standard and Objectives*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator

---

<sup>22</sup> Ibid Hal. 88



keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan<sup>23</sup>.

### 3. Sumber Daya Kebijakan (*Policy Resources*)

Sumber daya yang dimaksud adalah dana, materi, manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian hukuman bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya<sup>24</sup>.

### 4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)

Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Demikian pula, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana. Aktivitas penguatan yang dimaksud adalah *technical advice and assistance* dan ganjaran baik positif maupun negatif, bagi pihak pelaksana kebijakan<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Ibid Hal. 85

<sup>24</sup> Ibid Hal. 85

<sup>25</sup> Ibid Hal. 86

5. Karakteristik Organisasi Pelaksana (*Characteristic of Implementing Agencies*)

Ada 6 karakteristik yang perlu dimiliki badan pelaksana kebijakan, yaitu<sup>26</sup>:

- a. Kompetensi dan ukuran staf lembaga
- b. Tingkat kontrol hirarkis dari keputusan dan proses subunit dalam lembaga pelaksana
- c. Sumber daya politik lembaga (misalnya, dukungan di antara legislator dan eksekutif)
- d. Vitalitas organisasi
- e. Tingkat komunikasi terbuka di dalam suatu organisasi
- f. Hubungan formal dan formal dan informal lembaga dengan badan pembuat kebijakan atau penegakan kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Economic, Social, and Political Condition*)

Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu variabel yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

---

<sup>26</sup> Ibid Hal. 86-87

## 7. Sikap Pelaksana (*Disposition of Implementators*)

Variabel lain yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap komponen dalam model ini akan disaring melalui persepsi dari para pelaksana. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response*<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Ibid Hal. 88